

# **PENGADILAN AGAMA BIMA**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2024**

**Jl. Gatot Subroto No. 10**

**Telp. 0374-6191134**

**Mpunda, Kota Bima- Nusa Tenggara Barat**

**e-mail : [info@pa-bima.go.id](mailto:info@pa-bima.go.id) web : [www.pa-bima.go.id](http://www.pa-bima.go.id)**



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BIMA**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2024**

**BAGIAN ANGGARAN 005.04**

**BADAN PERADILAN AGAMA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Gatot Subroto No. 10

Telp. 0374-6191134

Mpunda, Kota Bima- Nusa Tenggara Barat

e-mail : [info@pa-bima.go.id](mailto:info@pa-bima.go.id) web : [www.pa-bima.go.id](http://www.pa-bima.go.id)

# ***KATA PENGANTAR***

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Bima adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Bima. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bima, 12 Juli 2024

Klasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



OSMAN, S.Ag.

NIP. 196612311997031021

# ***DAFTAR ISI***

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran .....	iv
Pernyataan Tanggung Jawab .....	vi
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	5
II. Neraca.....	6
III. Laporan Operasional.....	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	11
A. Penjelasan Umum .....	11
A.1. Dasar Hukum.....	11
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bima .....	11
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	14
A.4. Basis Akuntansi .....	15
A.5. Dasar Pengukuran .....	15
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	16
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran .....	24
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	24
B.2. Belanja .....	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	27
C.1. Aset Lancar.....	27
C.2. Aset Tetap .....	28
C.5. Kewajiban Jangka Pendek/Utang Kepada Pihak Ketiga .....	30
C.6. Ekuitas.....	32
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	32
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak .....	32
D.2.....	32

Beban Pegawai.....	32
D.3.    Beban Persediaan.....	32
D.4.    Beban Barang dan Jasa.....	33
D.5.    Beban Pemeliharaan .....	33
D.6.    Beban Perjalanan Dinas.....	34
D.7.    Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat .....	34
D.8.    Beban Bantuan Sosial.....	34
D.9.    Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	35
D.10.   Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....	35
D.11.   Beban Lain-lain.....	36
D.12.   Kegiatan Non Operasional.....	36
D.13.   Pos Luar Biasa.....	36
E.    Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	37
E.1.   Ekuitas Awal .....	37
E.2.   Surplus (defisit) LO .....	37
E.1.   Penyesuaian Nilai Aset .....	37
E.2.   Koreksi Nilai Persediaan .....	38
E.3.   Koreksi Aset Tetap.....	38
E.4.   Koreksi atas Beban .....	38
E.5.   Koreksi Lain-lain .....	39
E.6.   Transaksi Antar Entitas.....	39
E.7.   Kenaikan/Penurunan Ekuitas .....	39
E.8.   Ekuitas Akhir .....	39
F.    Pengungkapan Penting Lainnya .....	39
F.1.   Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	39
F.2.   Pengungkapan Lain-lain .....	40
Laporan-laporan Pendukung.....	42
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap .....	43
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual .....	45

## ***DAFTAR TABEL***

# Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 30 Juni TA 2024 dan 2023 .....	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2024 dan 2023 .....	2
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang .....	18
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	20
Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud .....	22
Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2024 .....	24
Tabel 7 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2024 dan 2023 .....	24
Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024 .....	25
Tabel 9 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024.....	25
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 .....	26
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 .....	26
Tabel 12 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan 2023 .....	27
Tabel 13 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2024 dan 2023 .....	27
Tabel 14 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni TA 2024 dan 2023 .....	28
Tabel 15. Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2024 dan 2023 .....	28
Tabel 16. Rincian Aset Tetap.....	29
Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	30
Tabel 18. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2024 dan 2023 .....	31
Tabel 19. Rincian Realisasi PNBP per 30 Juni 2024 dan 2023.....	32
Tabel 20. Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 .....	33
Tabel 20. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 .....	33
Tabel 22. Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023.....	33
Tabel 23. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 .....	34
Tabel 24. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	34
Tabel 25. Rincian Beban Bantuan Sosial .....	35
Tabel 26. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	35
Tabel 27. Rincian Beban Piutang tak Tertagih.....	35
Tabel 28. Rincian Beban Lain-lain .....	36
Tabel 29. Rincian Kegiatan Non Operasional .....	36
Tabel 30. Rincian Pos Luar Biasa .....	37
Tabel 31. Rincian Penyesuaian Nilai Aset.....	37
Tabel 32. Rincian Koreksi Nilai Persediaan.....	38
Tabel 33. Rincian Koreksi atas Beban.....	38
Tabel 34. Rincian Koreksi Lain-lain.....	39

# ***PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB***

## PENGADILAN AGAMA BIMA

Jl. Gatot Subroto No. 10 Mpunda, Kota Bima - Nusa Tenggara Barat

Telp. 0374-6191134 e-mail : info@pa-bima.go.id web : www.pa-bima.go.id

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bima, 12 Juli 2024

Klasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



USMAN, S.Ag.  
NIP. 196612311997031021

# ***RINGKASAN***

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Bima Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2024 s.d 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp72,553,000 atau mencapai 38.37 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp189,073,000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp148,800,000 atau mencapai 58.35 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp255,000,000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 30 Juni TA 2024 dan 2023**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	189,073,000	72,553,000	38.37	81,634,000

Belanja Negara	255,000,000	148,800,000	58.35	148,000,000
----------------	-------------	-------------	-------	-------------

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2024 dan 2023.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp75,590,812 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp75,590,812; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp77,373,500 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp77,373,500 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp(1,782,688), yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp(1,782,688) dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp0.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2024 dan 2023**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	TA 2024	TA 2023	Rp.	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	75,590,812	6,483,640	69,107,172	1,065.87
Aset Tetap	0	0	0	0.00
Aset Lainnya	0	0	0	0.00
<b>Jumlah Aset</b>	<b>75,590,812</b>	<b>6,483,640</b>	<b>69,107,172</b>	<b>1,065.87</b>
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	77,373,500	0	77,373,500	0.00
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0.00
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>77,373,500</b>	<b>0</b>	<b>77,373,500</b>	<b>0.00</b>
<b>Ekuitas Dana</b>				
Ekuitas Dana Lancar	(1,782,688)	6,483,640	(8,266,328)	(127.50)
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0.00
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>(1,782,688)</b>	<b>6,483,640</b>	<b>(8,266,328)</b>	<b>(127.50)</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>75,590,812</b>	<b>6,483,640</b>	<b>69,107,172</b>	<b>1,065.87</b>

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp72,553,000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp165,386,328 sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(92,833,328), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus (defisit) sebesar Rp. 0 dan sebesar Rp. 0, sehingga entitas mengalami surplus (defisit) -LO sebesar Rp(92,833,328).

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp6,483,640 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp(92,833,328) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas Rp84,567,000. Dengan kenaikan ekuitas sebesar Rp(8,266,328) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp(1,782,688).

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2024, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# ***I. LRA PERBANDINGAN***

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA BIMA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	TA 2024			TA 2023
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	189,073,000	72,553,000	38.37	81,634,000
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>189,073,000</b>	<b>72,553,000</b>	<b>38.37</b>	<b>81,634,000</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	255,000,000	148,800,000	58.38	148,000,000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>255,000,000</b>	<b>148,800,000</b>	<b>58.35</b>	<b>148,000,000</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## ***II. NERACA PERBANDINGAN***

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA BIMA**  
**NERACA**  
**PER 30 JUNI 2024 DAN 2023**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	TA 2024	TA 2023
<b>ASET</b>			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	20,000,000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 2.	42,573,500	0
Persediaan	C.1. 3.	13,017,312	6,483,640
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>75,590,812</b>	<b>6,483,640</b>
Aset Tetap			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
<b>Jumlah Aset</b>		<b>75,590,812</b>	<b>6,483,640</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban Jangka Pendek			
C.5			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	42,573,500	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5. 2.	14,800,000	
Uang Muka dari KPPN	C.5. 3.	20,000,000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		77,373,500	0
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>77,373,500</b>	<b>0</b>

**EKUITAS**

Ekuitas Dana Lancar

C.6

Ekuitas

C.6. 1.

(1,782,688)

6,483,640

**Jumlah Ekuitas Dana****(1,782,688)****6,483,640****Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana****75,590,812****6,483,640**

### ***III. LAPORAN OPERASIONAL***

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN AGAMA BIMA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 30 JUNI 2024 DAN 2023**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	72,553,000	81,634,000
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>72,553,000</b>	<b>81,634,000</b>
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	13,136,328	12,047,000
Beban Barang dan Jasa	D. 4	58,500,000	48,000,000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	93,750,000	89,250,000
Beban Barang yang diserahkan kpd Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>165,386,328</b>	<b>149,297,000</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(92,833,328)</b>	<b>(67,663,000)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban jangka panjang		0	0
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>			
Beban Luar Biasa	D. 13	0	0
<b>Surplus (Defisit) Laporan Operasional</b>		<b>(92,833,328)</b>	<b>(67,663,000)</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA BIMA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 30 JUNI 2024 DAN 2023**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Ekuitas Awal	E. 1	6,483,640	11,581,724
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(92,833,328)	(67,663,000)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar			
Lain-lain			
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3	0	0
Koreksi Aset Tetap	E. 4	0	0
Koreksi Atas Beban	E. 5	0	0
Koreksi Atas pendapatan	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
<b>Jumlah Lain-lain</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Transaksi Antar Entitas	E. 8	84,567,000	72,237,640
<b>Kenaikan/Penurunan Ekuitas</b>	E. 9	<b>(8,266,328)</b>	<b>4,574,640</b>
<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>(1,782,688)</b>	<b>16,156,364</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

# **V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

---

### A. Penjelasan Umum

---

#### A.1. Dasar Hukum

---

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 90/PMMK.06/2014;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- q. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
- r. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- s. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Bima

Visi Pengadilan Agama Bima adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Bima yang profesional dan modern dalam rangka mewujudkan badan peradilan yang agung.

Misi Pengadilan Agama Bima adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan Mahkamah Agung RI;
2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan;
3. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Bima yang profesional, integritas dan bertaqwa;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang modern, efektif dan efisien;
5. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan berkelanjutan;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Bima melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

**1. Bidang Perkara**

Peningkatan mutu pelayanan kepada pencari keadilan dalam menerima perkara, peningkatan proses persidangan pemeriksaan perkara, peningkatan kualitas putusan/penetapan, peningkatan mutu penyelesaian perkara, penyediaan layanan informasi mengenai jalannya tahapan-tahapan persidangan dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga bisa diakses secara umum demi terwujudnya keterbukaan informasi dalam bidang pelayanan penyelesaian perkara dengan mengembangkan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

**2. Bidang Pengawasan Internal**

Meningkatkan mutu pengawasan terhadap perilaku dan kinerja hakim dan pejabat kepaniteraan baik yang bersifat rutin maupun insidentil, meningkatkan mutu pengawasan terhadap kinerja seluruh pegawai dan pejabat sekretariat baik yang bersifat rutin maupun insidentil.

**3. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)/Kepegawaian**

Meningkatkan mutu pelayanan dan kesejahteraan seluruh pegawai yang meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi dan mutasi, pemberian cuti, dan laporan kepegawaian

**4. Bidang Pengelolaan Keuangan**

Meningkatkan mutu perencanaan dan realisaasi dalam bidang Belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, dengan tetap berpegang kepada prinsip pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

#### 5. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Meningkatkan mutu administrasi tata persuratan, meningkatkan mutu pengelolaan barang-barang inventaris kantor serta administrasi dan pemeliharaan, meningkatkan mutu kebersihan dan keamanan kantor, meningkatkan mutu pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga lainnya.

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Bima.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satuan Kerja yang ada. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI terdiri atas SAKTI *online* dan SAKTI *offline*, yang menggunakan sistem *single entry point*, *single database*, *multi user* dan/atau multi Satuan Kerja, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan *audited*.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.

2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

#### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Bima adalah sebagai berikut:

### (1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

### (3.) Belanja

---

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (4.) Beban

---

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (5.) Aset

---

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### a. Aset Lancar

---

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
  - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah;
  - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tata Cara Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun

Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak

Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## **(7.) Ekuitas**

---

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah : Rp.  
72,553,000

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp72,553,000 atau mencapai 38.37 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp189,073,000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Bima adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan (425232)	0	0	0.00
Pendapatan Ongkos Perkara (425233)	72,200,000	30,730,000	42.56
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (425239)	116,873,000	41,823,000	35.78
<b>Total Pendapatan</b>	<b>189,073,000</b>	<b>72,553,000</b>	<b>38.37</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(9,081,000) atau (11.12)% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah penerimaan perkara tahun 2024 yang berimbang dengan menurunnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Agama Bima.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 7 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2024 dan 2023  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Ongkos Perkara	30,730,000	32,700,000	(1,970,000)	(6.02)
2.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	41,823,000	48,934,000	(7,111,000)	(14.53)
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>72,553,000</b>	<b>81,634,000</b>	<b>(9,081,000)</b>	<b>(11.12)</b>

## B.2. Belanja

Realisasi  
Belanja  
Negara :  
Rp.  
148,800,000

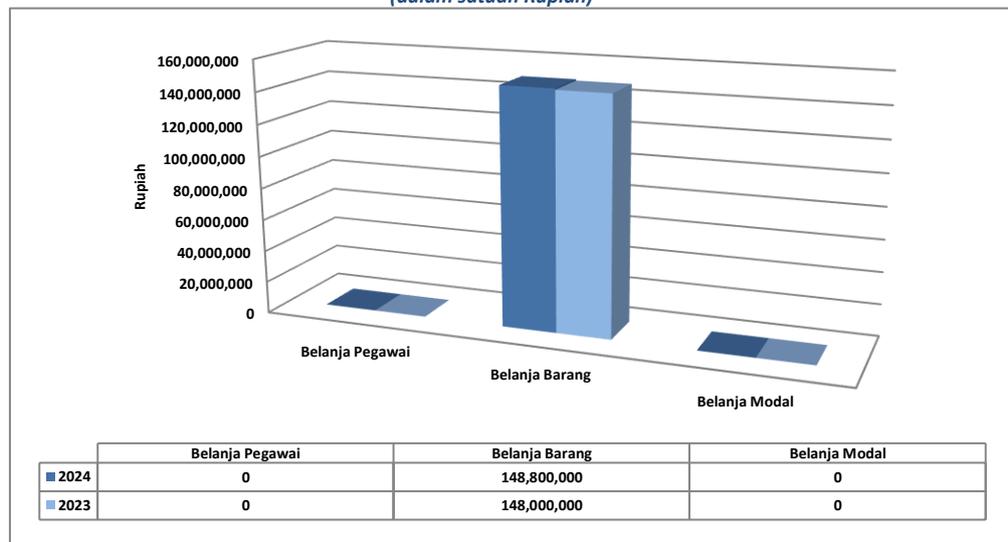
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Bima per 30 Juni TA 2024 adalah sebesar Rp148,800,000 atau sebesar 58.35% dari anggaran senilai Rp255,000,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2024		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	255,000,000	148,800,000	58.35
Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>255,000,000</b>	<b>148,800,000</b>	<b>58.35</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>255,000,000</b>	<b>148,800,000</b>	<b>58.35</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 9 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024**  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2024 & 2023

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp800,000 atau sebesar 0.54% dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

1. Meningkatnya realisasi belanja barang persediaan dan belanja jasa pada Pengadilan Agama Bima di tahun 2024;

Perbandingan realisasi belanja TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	148,800,000	148,000,000	800,000	0.54
Belanja Modal	0	0	0	0,00
<b>Total Belanja</b>	<b>148,800,000</b>	<b>148,000,000</b>	<b>800,000</b>	<b>0.54</b>

### B.2.1. Belanja Barang

Realisasi  
Belanja  
Barang :  
Rp.  
148,800,000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Bima per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp148,800,000 dan Rp148,000,000.

Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp800,000 atau sebesar 0.54% dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya realisasi belanja barang persediaan dan belanja jasa pada Pengadilan Agama Bima di tahun 2024;

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	0
Belanja Jasa	58,400,000	48,000,000	10,400,000	21.67
Belanja Barang Persediaan	11,350,000	10,750,000	600,000	5.58
Belanja Perjalanan Dinas	79,050,000	89,250,000	(10,200,000)	(11.43)
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>148,800,000</b>	<b>148,000,000</b>	<b>800,000</b>	<b>0.54</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0

Total Belanja Netto	148,800,000	148,000,000	800,000	0.54
---------------------	-------------	-------------	---------	------

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

### C.1. Aset Lancar

**Aset Lancar:** Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 75,590,812 dan Rp6,483,640.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Bima per 30 Juni 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah:

**Tabel 12 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan 2023**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	20,000,000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	42,573,500	0
Persediaan	13,017,312	6,483,640
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>75,590,812</b>	<b>6,483,640</b>

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

**Kas di Bendahara Pengeluaran:** Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp20,000,000 dan Rp0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

**Tabel 13 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2024 dan 2023**

Uraian	TA 2024	TA 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	20,000,000	0
<b>Total</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>

### C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan Setara Kas: Rp. 42,573,500*

Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp42,573,500 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas adalah dalam bentuk uang titipan pihak ketiga/uang sisa panjar biaya perkara yang belum diambil oleh para pihak berperkara sampai pada akhir bulan Juni 2024.

Tabel 14 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
Kas Lainnya dan Setara Kas	42,573,500	0
<b>Total</b>	<b>42,573,500</b>	<b>0</b>

### C.1.3. Persediaan

*Persediaan: Rp. 13,017,312*

Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp13,017,312 dan Rp6,483,640. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname Fisik.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2024 dan 2023

Uraian	TA 2024	TA 2023
Persediaan	13,017,312	6,483,640
<b>Total</b>	<b>13,017,312</b>	<b>6,483,640</b>

## C.2. Aset Tetap

**Aset Tetap : Rp.0** Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 2023 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 16. Rincian Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan
1	-	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

#### C.2.1. Tanah

**Tanah: Rp. 0** Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2024 dan 2023 tidak ada perubahan nilai yakni sebesar Rp. 0.

#### C.2.2. Peralatan dan Mesin

**Peralatan dan Mesin : Rp. 0** Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

#### C.2.3. Gedung dan Bangunan

**Gedung dan Bangunan : Rp. 0** Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

#### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

**Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp. 0** Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

#### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap  
Lainnya: Rp. 0

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

#### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi  
dalam  
Pengerjaan : Rp.  
0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

#### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap : Rp. 0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2024 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	-	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

### C.5. Kewajiban Jangka Pendek/Utang Kepada Pihak Ketiga

Kewajiban  
Jangka Pendek  
:  
Rp. 77,373,500

Nilai Kewajiban Jangka Pendek (utang kepada pihak ketiga) per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp77,373,500 dan Rp0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu

kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp77,373,500.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Bima per 30 Juni 2024 disajikan pada tabel di bawah :

**Tabel 18. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2024 dan 2023**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
Utang kepada Pihak Ketiga	42,573,500	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	14,800,000	0
Uang Muka dari KPPN	20,000,000	0
<b>Jumlah</b>	<b>77,373,500</b>	<b>0</b>

#### C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada  
Pihak Ketiga :  
Rp. 42,573,500*

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp42,573,500 dan Rp0. Nominal Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 diperoleh dari saldo bank RPL yaitu uang titipan pihak ketiga/uang sisa panjar biaya perkara yang belum diambil oleh para pihak berperkara sampai dengan tanggal neraca. Utang kepada Pihak Ketiga adalah akun pasangan dari Kas Lainnya dan Setara Kas yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

#### C.5.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

*Utang kepada  
Pihak Ketiga :  
Rp. 14,800,000*

Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp14,800,000 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan kwitansi uang persediaan (UP) belum di SPJ-kan per 30 Juni 2024.

#### C.5.3. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka  
dari KPPN:  
Rp. 20,000,000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp20,000,000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang

Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

## C.6. Ekuitas

*Ekuitas:  
Rp. (1,782,688)*

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp (1,782,688) dan Rp 6,483,640. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan  
PNBP : Rp.  
72,553,000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp72,553,000 dan Rp81,634,000. Turun sebesar Rp (9,081,000) atau (11.12)%. Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Tabel 19. Rincian Realisasi PNBP per 30 Juni 2024 dan 2023**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023	%
1	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	0	0
2	Pendapatan Ongkos Perkara	30,730,000	32,700,000	(6.02)
3	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	41,823,000	48,934,000	(14.53)
<b>Total Pendapatan</b>		<b>72,553,000</b>	<b>81,634,000</b>	<b>(11.12)</b>

### D.2. Beban Pegawai

Tidak ada beban pegawai untuk satuan kerja 309113

### D.3. Beban Persediaan

*Beban  
Persediaan :  
Rp. 13,136,328*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp13,136,328 dan Rp12,047,000. Naik Rp1,089,328 atau 9.04%. Kenaikan Beban Persediaan pada tahun 2024 dikarenakan adanya anggaran untuk Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi perkara prodeo. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak

dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan	13,136,328	12,047,000	1,089,328	9.04
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>13,136,328</b>	<b>12,047,000</b>	<b>1,089,328</b>	<b>9.04</b>

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang  
& Jasa :  
Rp. 58,500,000

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp58,500,000 dan Rp48,000,000. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Barang dan Jasa	58,500,000	48,000,000	10,500,000	21.88
<b>Total Beban Barang dan Jasa</b>	<b>58,500,000</b>	<b>48,000,000</b>	<b>10,500,000</b>	<b>21.88</b>

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Beban  
Pemeliharaan:  
Rp. 0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan	0	0	0	0
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban  
Perjalanan  
Dinas : Rp.  
93,750,000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp93,750,000 dan Rp89,250,000. Beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp4,500,000 atau 5.04% dari tahun sebelumnya. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 23. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Dinas	93,750,000	89,250,000	4,500,000	5.04
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>93,750,000</b>	<b>89,250,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>5.04</b>

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat :  
Rp. 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 24. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
	0	0	0	
<b>Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan  
Sosial : Rp. 0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan

beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Beban Bantuan Sosial  
per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
	0	0	0	0
<b>Total Beban Bantuan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi : Rp.  
0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban  
Penyisihan  
Piutang tak  
Tertagih : Rp.  
0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Beban Piutang tak Tertagih  
per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
	0	0	0	0

Total Beban Penyisihan	0	0	0	0
Piutang tak Tertagih				

### D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain  
: Rp. 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Beban Lain-lain  
per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

### D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan  
Non  
Operasional :  
Rp.0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Rincian Kegiatan Non Operasional  
per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

### D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar  
Biasa : Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Pos Luar Biasa  
per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
	0	0	0	0
<b>Total Pos Luar Biasa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal : Rp6,483,640* Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6,483,640 dan Rp11,581,724.

### E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisit) LO : Rp. (92,833,328)* Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(92,833,328) dan Rp(67,663,000). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Untuk tahun 2024 mengalami penurunan Surplus/Defisit-LO sebesar Rp(25,170,328) dari tahun 2023.

### E.3. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian Nilai Aset : Rp 0* Penyesuaian Nilai Aset merupakan penyesuaian nilai aset yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Rincian Penyesuaian Nilai Aset  
per 30 Juni TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Penyesuaian Nilai aset	0
<b>Total Penyesuaian Nilai aset</b>	<b>0</b>

#### E.4. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai  
Persediaan :  
Rp. 0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 32. Rincian Koreksi Nilai Persediaan  
per 30 Juni TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	0
<b>Total Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>0</b>

#### E.5. Koreksi Aset Tetap

*Koreksi Aset  
Tetap : Rp. 0*

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

#### E.6. Koreksi atas Beban

*Koreksi Aset  
Beban : Rp 0*

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 33. Rincian Koreksi atas Beban  
per 30 Juni TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi atas Beban	0
<b>Total Koreksi atas beban</b>	<b>0</b>

## E.7. Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-lain : Rp 0*

Koreksi Lain-Lain merupakan koreksi yang tidak termasuk dalam poin koreksi yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 34. Rincian Koreksi Lain-lain  
per 30 Juni TA 2024  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi Lain-lain	0
<b>Total Koreksi Lain-lain</b>	<b>0</b>

## E.8. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar Entitas: Rp. 84,567,000*

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp84,567,000 dan Rp72,237,640 yang berarti terdapat kenaikan sebesar Rp12,329,360 dari tahun 2023.

## E.9. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

*Kenaikan/Penurunan Ekuitas: Rp. (8,266,328)*

Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(8,266,328) dan Rp4,574,640 yang berarti terdapat penurunan sebesar Rp(12,840,968) dari tahun 2023.

## E.10. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir : Rp. (1,782,688)*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp(1,782,688) dan Rp16,156,364 yang berarti terdapat penurunan sebesar Rp(17,939,052) dari nilai tahun 2023.

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

## F.2. Pengungkapan Lain-lain

### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak Ada Pemeriksaan BPK untuk Satker Pengadilan Agama Bima TA 2024.

### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual untuk periode pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2024.

### F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Bima adalah:

1. BRI Virtual Account Nomor Rekening 651543091131000 Nama Rekening BPG 071 PA BIMA 04, Nomor Izin 000218/071 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp. 0.
2. BSI Kantor Cabang Bima Nomor Rekening 7261759467 Nama Rekening RPL 071 PS PA BIMA BIAYA PERKARA Nomor Izin 000291 tanggal 5 Maret 2024 yang digunakan sebagai Penampung biaya perkara Pengadilan Agama Bima dengan saldo akhir per 30 Juni 2023 sebesar Rp42,573,500.
3. BRI Kantor Cabang Bima A/C 0079-01-000445-30-0 a.n. RPL 071 PA BIMA UTK PDT BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung biaya perkara Pengadilan Agama Bima ditutup per tanggal 15 Februari 2024.
4. BRI Kantor Cabang Bima A/C 007901001727307 a.n. RPL 071 PS PA BIMA UNTUK PANJAR BP yang digunakan sebagai penampung sementara panjar biaya perkara Pengadilan Agama Bima telah ditutup per tanggal 22 Februari 2024.

#### **F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3**

---

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

#### **F.2.5. Revisi DIPA**

---

Untuk periode pelaporan keuangan per 30 Juni Tahun 2024 Pengadilan Agama Bima melakukan 2 (dua) kali Revisi DIPA, DIPA-005.04.2.309113/2024 tanggal 13 Februari 2024 dan 19 April 2024 terkait dengan perubahan Pemutakhiran Data Halaman III DIPA.

#### **F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

---

Tidak ada Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB untuk periode pelaporan keuangan TA 2024 kali ini.

#### **F.2.7. Catatan Penting Lainnya**

---

Untuk Periode pelaporan keuangan per 30 Juni Tahun 2024 tidak terdapat catatan penting lainnya.

# **LAPORAN PENDUKUNG**

---

***LAMPIRAN A.1***

***PENYUSUTAN ASET TETAP***

**LAMPIRAN A.1**  
**RINCIAN PENYUSUTAN ASET TETAP**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**  
**30 JUNI 2024**

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Bima, 12 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



USMAN, S.Ag.

NIP. 196612311997031021

## ***LAMPIRAN A.2***

### ***KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan***

LAMPIRAN A.2  
DAFTAR KONTRUKSI DALAM Pengerjaan  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  
30 JUNI 2024

No.	URAIAN AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG	JUMLAH S.D 1 JANUARI 2024	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 30 JUNI 2024	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Bima, 12 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



USMAN, S.Ag.

NIP. 196612311997031021

## **LAMPIRAN A.3**

### **HIBAH**

**LAMPIRAN A.3**  
**DAFTAR HIBAH**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**  
**30 JUNI 2024**

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Bima, 12 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



**USMAN, S.Ag.**

NIP. 196612311997031021

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN**  
**TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)**  
**SEMESTERAN TA 2024**

Kode dan Nama UAKPA : (309113) PENGADILAN AGAMA BIMA  
 Kode dan Nama UAPPAW: (2300) NUSA TENGGARA BARAT  
 Kode dan Nama Eselon I : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
 Kode dan Nama K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>			
<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Pernyataan Tanggung Jawab	V		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>	V		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	V		Ada
<b>Laporan Keuangan Tambahan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	V		Ada
2. Neraca Percobaan AkruaI	V		Ada
3. Neraca Percobaan Kas	V		Ada
4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V		Ada
<b>KESESUAIAN LAPORAN DENGAN SAKTI/ MonSAKTI</b>			
<b>Kesesuaian Saldo</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan Aplikasi Sakti/Monsakti termasuk perbandingan dengan tahun 2021?	V		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/ MonSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
<b>KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI</b>			
<b>Persamaan Dasar Akuntansi</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Nilai "Surplus/ (Defisit)-LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	V		Sama
2. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca	V		Sama
3. Neraca: Aset = Kewajiban + Ekuitas	V		Sama
<b>PENGECEKAN PADA MonSAKTI</b>			
<b>To Do List</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Terdapat Pagu Minus per tanggal pelaporan		V	Tidak
2. Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)		V	Tidak
3. Terdapat Persediaan belum Didetilkkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
4. Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V	Tidak
5. Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah dan CaLK)		V	Tidak
6. Terdapat Aset Belum Didetilkkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
7. Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V	Tidak
8. Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V	Tidak
9. Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V	Tidak
10. Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		V	Tidak
11. Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak

12. Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah dan CaLK</i>			
<b>Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah "TDK RUPIAH" Yang BEDA?		V	Tidak
2. Adakah "TDK COA" Yang BEDA?		V	Tidak
3. Adakah "TDK Detail" Yang BEDA?		V	Tidak
a. Pagu/DIPA		V	Tidak
b. Estimasi PNBP		V	Tidak
c. Belanja		V	Tidak
d. Pengembalian Belanja		V	Tidak
e. Pendapatan		V	Tidak
f. Pengembalian Pendapatan		V	Tidak
g. Kas BLU		V	Tidak
h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
i. Kas Hibah		V	Tidak
j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
<b>Rekon Internal</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak

Daftar MonSAKTI		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika Ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		V	Ada/Tidak
2.	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		V	Ada/Tidak
3.	Adakah Neraca Tidak Balance		V	Tidak
4.	Adakah Pagu Minus		V	Tidak
5.	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi		V	Tidak
6.	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL</b>				
<b>Pengecekan Saldo Neraca Percobaan</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		V	Tidak
2.	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3.	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
<b>Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2.	Akun Penyisihan Piutang (116XXX) dan Akumulasi Penyusutan (137XXX dan 169XXX) bersaldo (K)	V		Ya
3.	Akun Kewajiban (2XXXXX) bersaldo (K)	V		Ya
4.	Akun Pendapatan (4XXXXX) bersaldo (K)	V		Ya
5.	Akun Pengembalian Pendapatan (4XXXXX) bersaldo (D)	V		Ya
6.	Akun Belanja/Beban (5XXXXX) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7.	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5XXXXX) bersaldo (K)	V		Ya
<b>Akun-Akun yang tidak boleh ada</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Tidak
2.	Terdapat Akun 1111XX hingga 1115XX. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116XX hingga 1119XX, selainnya akun BUN)		V	Tidak
3.	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
4.	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5.	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6.	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7.	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8.	Terdapat Akun 41XXXX/43XXXX (Pendapatan Perpajakan/Hibah)		V	Tidak
9.	Terdapat Akun 421XXX/422XXX/423XXX dan 425XXX KHUSUS BUN		V	Tidak
10.	Terdapat Akun 425XXX Khusus BUN (425143/ 144/ 161/ 162/ 719/ 745/ 772/ 773/ 774/ 815/ 816/ 998)		V	Tidak
11.	Terdapat Akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/ Subsidi/ Hibah/ Lain-lain/ Transfer TAYL)		V	Tidak
12.	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/ Subsidi/ Hibah/ Lain-lain)		V	Tidak
13.	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
<b>Jika Bukan Satker BLU</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>

1.	Terdapat Akun Neraca (1XXXXX dan 2XXXXX) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2.	Terdapat Akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3.	Terdapat Akun 525XXX (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4.	Terdapat Akun 537XXX (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
<b>Terkait Satker BLU</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		N/A	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		N/A	Tidak
<b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai tusi? Misalnya ada persediaan/ realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/ Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah / Bantuan Sosial		V	Tidak
2.	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya, kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
<b>Hibah Langsung</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung Uang/Barang/Jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			V	Ada/Tidak
1.	Adakah akun 218211 (Hibah Langsung yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		N/A	Ada/Tidak
2.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan Saldo Awal)		N/A	Ada/Tidak
3.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan akun 391133 - Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		N/A	Ya
4.	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		N/A	Ya
5.	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung yang Belum Disahkan)?		N/A	Ya
Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			N/A	Ada/Tidak
1.	Pengesahan Pendapatan Hibah (424XXX) jika Hibah Uang		N/A	Ya
<b>Transfer Masuk/ Transfer Keluar dan Resiprokal</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MonSAKTI	<b>0</b>		
2.	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurangi TM di Neraca Percobaan)	<b>0</b>		
3.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
<b>Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Apakah terdapat akun 425913 pada <b>Neraca Percobaan Kas?</b>		V	Ya/Tidak
2.	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		N/A	Ya/Tidak
3.	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di Neraca Percobaan Akrual?		N/A	Ya
<b>Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>

1.	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal)		N/A	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
<b>Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan dalam CaLK terkait koreksi persediaan serta dicantumkan dalam catatan telaah.		V	Ya/Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA</b>				
<b>Pengecekan Pos-pos Neraca</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2.	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4.	Kas di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5.	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau deposito	V		Ya
6.	Dari kolom perbandingan, adakah kenaikan/ penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7.	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8.	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
<b>PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL</b>				
<b>Pengecekan Pos-pos LO</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Terdapat pendapatan perpajakan (Kecuali K/L 015)		V	Tidak
2.	Terdapat pendapatan hibah (43XXXX), beban pembayaran kewajiban utang (54XXXX), beban subsidi (55XXXX), beban hibah (56XXXX), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6XXXXX), atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		V	Tidak
3.	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4.	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5.	Bandingkan dengan Laporan Operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/ penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6.	Surplus/ defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7.	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
<b>PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>				
<b>Pengecekan Pos-pos LPE</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/ Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2.	Terdapat kenaikan/ penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3.	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP	#N/A	#N/A	Tidak
4.	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
<b>Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi antar Entitas</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	V		Ya
	Contoh: Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			

2.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	V		Ya
<b>PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)</b>				
<b>Pengecekan Pos-pos LRA/B/P</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2.	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3.	Terdapat pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4.	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5.	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	V		Ya
<b>TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN</b>				
<b>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Ada Akun Piutang/Piutang TP/ Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/ Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		N/A	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		N/A	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		N/A	Ya/Tidak
2.	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		N/A	Ya/Tidak
3.	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4.	Ada Aset Tetap/ Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	V		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		N/A	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/ Amortisasi (di LO)		N/A	Ya/Tidak
5.	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		V	Ya/Tidak
	- Jika ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		N/A	Ya
<b>Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat &amp; Beban Bansos</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		N/A	Ya
2.	Apakah ada Beban Bansos?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		N/A	Ya
<b>Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika, ada, Karwas dan/atau Memo harus ditatausahakan)</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
2.	Ada realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		V	Ya/Tidak
	- Maka ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		N/A	Ya/Tidak
3.	Ada akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
4.	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		V	Ya/Tidak
	- Maka ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
5.	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
<b>TELAAH LK BLU</b>				
<b>LPSAL BLU</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>

1.	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		N/A	Ya
2.	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		N/A	Tidak
3.	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?		N/A	Ya
4.	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?		N/A	Ya
5.	Apakah Nilai SiLPA, SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(Defisit) pada LRA		N/A	Ya
6.	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU?		N/A	Ya
<b>LAK BLU</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119XX, 111826, 1133XX, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?		N/A	Ya
2.	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?		N/A	Ya
3.	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		N/A	Ya
4.	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU		N/A	Ya
5.	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca		N/A	Ya
6.	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		N/A	Ya
7.	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo Akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU		N/A	Ya
<b>LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN</b>				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&amp;LK"</i>				

Mengetahui  
 Pejabat Penyusun LKKL,  
  
 (USMAN, S.Ag.)  
 NIP. 196612311997031021

Bima, 12 Juli 2024

Penelaah,



(NAJIR, S.Ag.)

NIP. 197606072001121003

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS**  
**PENGADILAN AGAMA BIMA**  
**PERIODE : 01 JUNI 2024 – 28 JUNI 2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal 04 Juli 2024 pukul 10:45 WIB yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Ihyaddin, S.Ag, M.H.  
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima

Melakukan pemeriksaan Kas terhadap :

Nama : Drs. H. Ikhlas  
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Bima.

Berdasar hasil pemeriksian keuangan perkara serta bukti-bukti yang ada dalam pengurusan itu, kamimenemukan kenyataan sebagai berikut :

**I. Saldo Kas (ASET)**

1. Uang Tunai	52.443.500
2. Meterai	470.000
3. Saldo Bank BSI No. Rek Giro 7261759467	42.573.500
<b>Jumlah Aset</b>	<b>95.487.000</b>

**II. Saldo Buku (KEWAJIBAN) :**

**A. Saldo Buku Keuangan Perkara :**

1. Biaya panjar perkara (L1.PA 7.a)	63.968.284
2. Biaya panjar Eksekusi (L1.PA 7.b)	2.195.000
3. Biaya panjar Konsignasi (L1.PA 7.c)	0
Jumlah A	66.163.284

**B. Saldo Buku Bantu :**

1. Biaya panggilan dan PBT	833.500
2. Uang Iwadl	0
3. Uang Konsinyasi	0
4. Uang Hasil Eksekusi	0
5. Biaya Perkara Belum didaftar Daftar	1.820.216
6. Uang Mut'ah	0
7. Uang Nafkah Iddah	25.000.000
8. Biaya ATK Perkara	0
9. Biaya Delegasi	0
10. Uang PNBPFungsional	1.670.000
Jumlah B	29.323.716

**Jumlah Kewajiban (A+B) 95.487.000**

**Kesimpulan :**

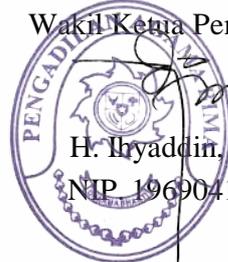
1. Ok 0
2. Seluruh transaksi keuangan pada saldo buku dilengkapi dengan bukti transaksi yang sesuai / tidaksesuai\*



Yang Diperiksa

Drs. H. Ikhlas  
NIP. 196812311993031042

Pejabat Yang Memeriksa  
Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima



H. Ihyaddin, S.Ag. M.H.  
NIP. 196904171999031003

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS  
PENGADILAN AGAMA BIMA  
PERIODE : 01 JUNI 2024 – 28 JUNI 2024**

I. Saldo Kas (ASET)

A. Kas Tunai

1.	Pecahan 100.000 sebanyak	524 lembar	=	Rp 52.400.000
2.	Pecahan 50.000 sebanyak	0 lembar	=	Rp 0
3.	Pecahan 20.000 sebanyak	2 lembar	=	Rp 40.000
4.	Pecahan 10.000 sebanyak	0 lembar	=	Rp 0
5.	Pecahan 5.000 sebanyak	0 lembar	=	Rp 0
6.	Pecahan 2.000 sebanyak	0 lembar	=	Rp 0
7.	Pecahan 1.000 sebanyak	3 lembar/ Keping	=	Rp3.000
8.	Pecahan 500 sebanyak	1 Keping	=	Rp 500
9.	Pecahan 100 sebanyak	0 Keping	=	Rp 0
10.	Pecahan 50 sebanyak	0 Keping	=	Rp 0
<hr/>				
Jumlah Kas Tunai				Rp 52.443.500
<hr/>				

B. Meterai

1.	Lembaran 3.000 sebanyak	0 lembar	=	Rp 0
2.	Lembaran 6.000 sebanyak	0 lembar	=	Rp 0
3.	Lembaran 10.000 sebanyak	47 lembar	=	Rp 470.000
<hr/>				
Jumlah nilai Meterai				Rp 470.000
<hr/>				

C. Bank

No.	Nama Bank	Nomor Rekening	Saldo
1.	BSI	7261759467	Rp42.573.500
<hr/>			
Jumlah nilai Meterai			Rp42.573.500
<hr/>			



Yang Diperiksa

Drs. H. Ikhlas  
NIP. 196812311993031042

Pejabat Yang Memeriksa  
Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima

H. Hayaddin, S.Ag. M.H.  
NIP. 196904171999031003



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG 005  
**ESELON I** : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04  
**SATUAN KERJA** : PENGADILAN AGAMA BIMA 309113

Tgl Data : 19/07/24 6:26 AM  
Tgl Cetak : 19/07/24 7:10 AM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>a. Dana Perimbangan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Dana Transfer Umum</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Transfer Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b. Dana Insentif Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c. Dana Keistimewaan DIY</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>d. Dana Otonomi Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Desa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Hibah Kepada Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>255,000,000</b>	<b>148,800,000</b>	<b>(106,200,000)</b>	<b>58</b>	<b>241,000,000</b>	<b>148,000,000</b>	<b>93,000,000</b>	<b>61</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

null, 19 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA  
KLASA PENGGUNA ANGGARAN



NERACA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 30 JUNI 2024  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
UNIT ORGANISASI : ( 04 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
WILAYAH/PROVINSI : ( 2300 ) NUSA TENGGARA BARAT  
SATUAN KERJA : ( 309113 ) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 19/07/24 6:21 AM  
Tgl Cetak : 19/07/24 7:10 AM  
Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	20,000,000	0	20,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	42,573,500	0	42,573,500	0.00
Persediaan	13,017,312	6,483,640	6,533,672	100.77
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>75,590,812</b>	<b>6,483,640</b>	<b>69,107,172</b>	<b>1,065.87</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>75,590,812</b>	<b>6,483,640</b>	<b>69,107,172</b>	<b>1,065.87</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	42,573,500	0	42,573,500	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	14,800,000	0	14,800,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	20,000,000	0	20,000,000	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>77,373,500</b>	<b>0</b>	<b>77,373,500</b>	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>77,373,500</b>	<b>0</b>	<b>77,373,500</b>	
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	(1,782,688)	6,483,640	(8,266,328)	(127.50)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>(1,782,688)</b>	<b>6,483,640</b>	<b>(8,266,328)</b>	<b>(127.50)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>(1,782,688)</b>	<b>6,483,640</b>	<b>(8,266,328)</b>	<b>(127.50)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>75,590,812</b>	<b>6,483,640</b>	<b>69,107,172</b>	<b>1,065.87</b>

Keterangan :

FINAL

null, 19 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



USMAN

196612311997031021

## LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 04 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : ( 2300 ) NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA : ( 309113 ) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 19/07/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 19/07/24 7:09 AM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	72,553,000	81,634,000	(9,081,000)	(11.124)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	72,553,000	81,634,000	(9,081,000)	(11.124)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	72,553,000	81,634,000	(9,081,000)	(11.124)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	13,136,328	12,047,000	1,089,328	9.042
Beban Barang dan Jasa	58,500,000	48,000,000	10,500,000	21.875
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	93,750,000	89,250,000	4,500,000	5.042
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

## LAPORAN OPERASIONAL

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 04 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : ( 2300 ) NUSA TENGGARA BARAT

SATUAN KERJA : ( 309113 ) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 19/07/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 19/07/24 7:09 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	165,386,328	149,297,000	16,089,328	10.777
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(92,833,328)	(67,663,000)	(25,170,328)	37.2
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(92,833,328)	(67,663,000)	(25,170,328)	37.2
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(92,833,328)	(67,663,000)	(25,170,328)	37.2

Keterangan :

FINAL

null, 19 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



USMAN

196612311997031021

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 30 JUNI 2024  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
UNIT ORGANISASI : ( 04 ) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
WILAYAH/PROVINSI : ( 2300 ) NUSA TENGGARA BARAT  
SATUAN KERJA : ( 309113 ) PENGADILAN AGAMA BIMA

Tgl Data : 19/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 19/07/24 7:09 AM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker\_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	6,483,640	11,581,724	(5,098,084)	(44.02)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(92,833,328)	(67,663,000)	(25,170,328)	37.2
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	84,567,000	72,237,640	12,329,360	17.07
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(8,266,328)	4,574,640	(12,840,968)	(280.7)
EKUITAS AKHIR	(1,782,688)	16,156,364	(17,939,052)	(111.03)

Keterangan :

FINAL

null, 19 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



USMAN

196612311997031021